



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3124 K/80/MEM/2012

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN
DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN
UMUM (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) Untuk Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4595);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
13. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2013 Nomor 900/1176/Keuda tanggal 8 Oktober 2012;
 2. Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2013 Nomor 900/1177/Keuda tanggal 8 Oktober 2012;

3. Berita ...

3. Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2013 Nomor 900/1180/Keuda tanggal 8 Oktober 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) UNTUK TAHUN 2013.

KESATU : Jumlah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2013 untuk masing-masing subsektor adalah sebagai berikut:

- a. subsektor pertambangan minyak bumi sejumlah 7 (tujuh) Provinsi, 56 (lima puluh enam) Kabupaten, dan 6 (enam) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. subsektor pertambangan gas bumi sejumlah 6 (enam) Provinsi, 36 (tiga puluh enam) Kabupaten, dan 7 (tujuh) Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- c. subsektor pertambangan panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan panas bumi sejumlah 4 (empat) Kabupaten serta yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi sejumlah 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 3 (tiga) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- d. subsektor pertambangan umum (pertambangan mineral dan batubara) sejumlah 2 (dua) Provinsi, 260 (dua ratus enam puluh) Kabupaten, dan 17 (tujuh belas) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dasar penghitungan bagian daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. sumber daya alam subsektor minyak dan gas bumi, dasar penghitungan bagian daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi adalah *lifting* minyak bumi dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu PT Pertamina EP, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil, atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama lainnya di daerah bersangkutan;

b. sumber ...

b. sumber daya alam subsektor pertambangan panas bumi:

1. penetapan prosentase daerah penghasil sumber daya alam pertambangan panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan panas bumi dihitung berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi sebagai berikut:

No.	Parameter	Bobot Penilaian
1.	Area kontrak/prospek	20 %
2.	Infrastruktur produksi : a. Sumur produksi (10%) b. Sumur injeksi (5 %) c. Jaringan pipa (5%) d. Pembangkit (10%)	30 %
3.	Infrastruktur penunjang : a. Infrastruktur bangunan (10%) b. Infrastruktur jalan (10%)	20 %
4.	Realisasi produksi	30 %
Total		100 %

2. perkiraan penerimaan yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi dihitung berdasarkan luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan).

c. sumber daya alam subsektor pertambangan umum (pertambangan mineral dan batubara):

1. perkiraan penerimaan dari Iuran Tetap yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan);
2. perkiraan penerimaan dari Iuran Produksi (Royalti) dihitung jumlah produksi x tarif x harga jual.

KETIGA

: Penetapan daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. sumber daya alam subsektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi:

1. daerah penghasil untuk Wilayah Kerja di daratan (*onshore*) adalah kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara;
2. daerah penghasil untuk wilayah kerja di lepas pantai (*offshore*) adalah provinsi atau kabupaten/ kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

b. subsektor ...

- b. subsektor pertambangan panas bumi:
 1. daerah penghasil yang berasal dari Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan panas bumi ditentukan berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi;
 2. daerah penghasil yang berasal dari Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah kabupaten/kota di mana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara.
- c. subsektor pertambangan umum (pertambangan mineral dan batubara):
 1. daerah penghasil Iuran Tetap adalah provinsi atau kabupaten/kota di mana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara;
 2. daerah penghasil Iuran Produksi (Royalti) adalah provinsi atau kabupaten/kota di mana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

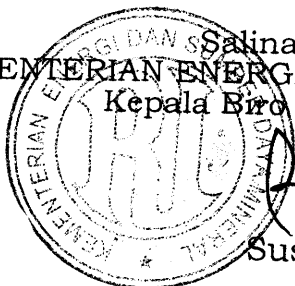
ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
8. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
9. Para gubernur yang bersangkutan
10. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 3124 K/80/MEM/2012
 TENTANG
 DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM
 (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
 UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
 SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI UNTUK TAHUN 2013

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
A	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	269.762,72
I	Aceh		2.312,86
		1. Kab. Aceh Timur	24,32
		2. Kab. Aceh Utara	996,69
		3. Kab. Aceh Tamiang	1.291,85
II.	Sumatera Utara		870,32
		1. Kab. Langkat	211,94
		2. Kota Binjai	19,48
		3. Kab. Deli Serdang	0,15
		4. Kab. Padang Lawas	638,75
III	Riau		133.169,45
		1. Kab. Bengkalis	71.399,25
		2. Kab. Indragiri Hulu	635,10
		3. Kab. Kampar	12.820,98
		4. Kab. Rokan Hulu	1.340,71
		5. Kab. Rokan Hilir	19.487,28
		6. Kab. Siak	24.626,90
		7. Kab. Pelalawan	469,86
		8. Kab. Kep. Meranti	2.389,37
IV	Kep. Riau		15.137,80
		1. Kab. Natuna	9.839,57
		2. Kab. Kep. Anambas	5.298,23
V	Jambi		11.264,68
		1. Kab. Batang Hari	144,30
		2. Kab. Muaro Jambi	1.179,88
		3. Kota Jambi	573,04
		4. Kab. Tanjung Jabung Timur	2.514,32
		5. Kab. Tanjung Jabung Barat	5.110,53
		6. Kab. Sarolangun	1.392,21
		7. Kab. Tebo	350,40
VI	Sumatera Selatan		31.033,35
		1. Kab. Lahat	336,05
		2. Kab. Muara Enim	9.200,68
		3. Kota Prabumulih	784,76
		4. Kab. Musi Banyuasin	12.867,40
		5. Kab. Banyuasin	1.795,46

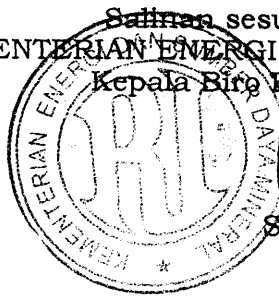
NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
		6. Kab. Musi Rawas	3.223,67
		7. Kab. Ogan Ilir	1.068,95
		8. Kab. Ogan Komering Ulu	1.756,38
VII	Lampung	Kab. Lampung Timur	2.323,71
VIII	Jawa Barat		5.942,25
		1. Kab. Indramayu	1.642,84
		2. Kab. Karawang	742,24
		3. Kab. Majalengka	74,24
		4. Kab. Subang	129,00
		5. Kab. Bekasi	3.353,93
IX	Jawa Tengah	Kab. Blora	236,31
X	Jawa Timur		30.355,95
		1. Kab. Bojonegoro	22.931,45
		2. Kab. Bangkalan	1.844,49
		3. Kab. Sumenep	68,26
		4. Kab. Tuban	661,50
		5. Kab. Gresik	4.830,17
		6. Kab. Sidoarjo	20,08
XI	Kalimantan Selatan		1.476,65
		1. Kab. Tabalong	1.426,97
		2. Kab. Balangan	49,68
XII	Kalimantan Timur		27.682,15
		1. Kab. Bulungan	2.582,97
		2. Kab. Nunukan	724,18
		3. Kota Tarakan	1.340,33
		4. Kota Samarinda	225,97
		5. Kab. Kutai Kartanegara	19.765,89
		6. Kab. Kutai Timur	701,56
		7. Kab. Penajam Paser Utara	1.520,06
		8. Kota Bontang	767,78
		9. Kab. Tana Tidung	53,41
XIII	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	24,46
XIV	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	771,69
XV	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	1.267,28
XVI	Papua Barat		5.893,81
		1. Kab. Teluk Bintuni	2.537,57
		2. Kab. Sorong	3.132,64
		2. Kab. Raja Ampat	223,60
B	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	33.016,66
		1. Lampung	4.592,87
		2. Bangka Belitung	433,20
		3. Jawa Barat	5.902,50
		4. Kalimantan Timur	16.225,89
		5. Kep. Riau	620,50
		6. Jawa Timur	1.785,97
		7. DKI Jakarta	3.455,73

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
C	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	25.720,63

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 3124 K/80/MEM/2012
 TENTANG
 DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM
 (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
 UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
 SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2013

NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
1	2	3	4
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	1.943.536,29
I	Aceh		35.724,38
		1. Kab. Aceh Timur	3.024,29
		2. Kab. Aceh Utara	32.700,09
II	Sumatera Utara		3.516,11
		1. Kab. Langkat	2.802,81
		2. Kota Binjai	544,35
		3. Kab. Deli Serdang	168,95
III	Riau		23.438,22
		1 Kab. Palalawan	17.400,18
		2 Kab. Kep. Meranti	3.780,36
		3 Kab. Kampar	2.257,68
IV	Kep. Riau		144.855,72
		1. Kab. Natuna	94.156,22
		2. Kab. Kep. Anambas	50.699,50
V	Jambi		72.440,21
		1. Kota Jambi	712,53
		2. Kab. Tanjung Jabung Timur	30.598,24
		3. Kab. Tanjung Jabung Barat	40.094,44
		4. Kab. Muaro Jambi	1.035,00
VI	Sumatera Selatan		605.176,99
		1. Kab. Lahat	10.710,42
		2. Kab. Muara Enim	50.375,76
		3. Kota Prabumulih	399,47
		4. Kab. Musi Banyuasin	375.800,01
		5. Kab. Musi Rawas	163.795,99
		6. Kab. Ogan Komering Ulu	4.095,34
VII	Jawa Barat		144.680,72
		1. Kab. Indramayu	11.312,55
		2. Kab. Karawang	43.520,99
		3. Kab. Majalengka	840,30
		4. Kab. Subang	69.547,32
		5. Kab. Bekasi	19.459,56

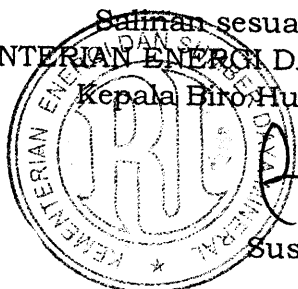
NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
1	2	3	4
VIII	Jawa Timur		44.078,06
		1. Kab. Sumenep	6.097,51
		2. Kab. Sidoarjo	1.701,16
		3. Kab. Gresik	30.766,75
		4. Kab. Bangkalan	1.488,83
		5. Kab. Bojonegoro	4.023,81
IX	Jawa Tengah		937,28
		1. Kota Semarang	897,22
		2. Kab. Blora	40,06
X	Kalimantan Timur		438.370,56
		1. Kota Tarakan	3.855,96
		2. Kota Samarinda	2.406,34
		3. Kab. Kutai Kartanegara	417.044,60
		4. Kab. Penajam Paser Utara	7.709,35
		5. Kota Bontang	3.745,78
		6. Kab. Nunukan	2.606,28
		7. Kab. Bulungan	1.002,25
XI	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	1.625,55
XII	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	20.791,96
XIII	Papua Barat		407.900,53
		1. Kab. Sorong	4.158,39
		2. Kab. Teluk Bintuni	403.742,14
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	530.874,96
		1. Jawa Barat	34.800,87
		2. Kalimantan Timur	321.678,93
		3. Kep. Riau	91.862,68
		4. Jawa Timur	54.860,26
		5. Lampung	13.836,11
		6. DKI Jakarta	13.836,11
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	405.438,76

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3124 K/80/MEM/2012
 TENTANG
 DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
 BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
 PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM
 (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
 UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
 SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG BERASAL DARI
 WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK
 OPERASI BERSAMA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI DAN
 KUASA PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2013

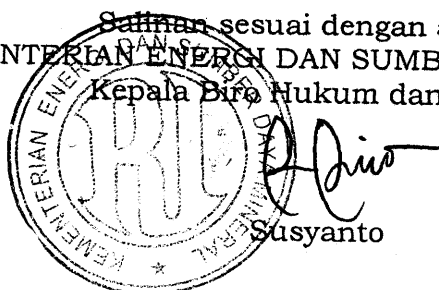
No.	Area / Kabupaten	Pengembang	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
1	2	3	4
I.	Gunung Salak	Chevron Geothermal Salak, Ltd	
1	Kabupaten Sukabumi		42,64
2	Kabupaten Bogor		57,36
II.	Darajat	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	
1	Kabupaten Garut		94,51
2	Kabupaten Bandung		5,49
III.	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energi (PGE)	
1	Kabupaten Bandung		86,14
2	Kabupaten Garut		13,86
IV	Wayang Windu		
	Kabupaten Bandung	Star Energy (Wayang Windu), Ltd.	100,00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3124 K/80/MEM/2012
TENTANG
BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM
(PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA PERTAMBANGAN PANAS BUMI YANG BERASAL DARI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2013

No.	Propinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)
1	2	3	4
I	Aceh	Kota Sabang	129.251.400
II	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	1.169.940.000
III	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	1.158.780.000
IV	Sumatera Selatan		659.556.000
		1 Kab. Lahat	163.240.110
		2 Kab. Muara Enim	420.335.039
		3 Kota Pagar Alam	75.980.851
V	Lampung		956.579.400
		1 Kab. Lampung Barat	593.507.400
		2 Kab. Lampung Selatan	363.072.000
VI	Jawa Barat		1.623.780.000
		1 Kab. Subang	411.996.919
		2 Kab. Sumedang	484.902.967
		3 Kab. Sukabumi	289.788.000
		4 Kab. Purwakarta	192.100.986
		5 Kab. Bandung Barat	244.991.128
VII	Banten		1.938.120.000
		1 Kab. Pandeglang	978.169.164
		2 Kab. Serang	959.950.836
VIII	Jawa Tengah		1.280.052.000
		1 Kota Semarang	497.189.160
		2 Kab. Kendal	57.090.840
		3 Kab. Pemasang	64.786.702
		4 Kab. Tegal	162.730.879
		5 Kab. Brebes	140.441.272
		6 Kab. Purbalingga	49.215.935
		7 Kab. Banyumas	308.597.212
IX	Jawa Timur		1.956.534.000
		1 Kab. Banyuwangi	773.614.994
		2 Kab. Situbondo	6.522.499
		3 Kab. Bondowoso	384.594.506
		4 Kab. Madiun	266.758.094
		5 Kab. Ponorogo	525.043.906

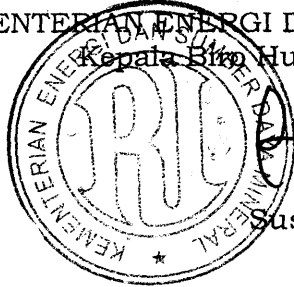
No.	Propinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)
1	2	3	4
X	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	359.166.000
XI	Nusa Tenggara Timur		1.372.122.000
		1 Kab. Lembata	580.320.000
		2 Kab. Ende	791.802.000
XII	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	252.588.000
Total			12.856.468.800

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto
Susyanto

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3124 K/80/MEM/2012
TENTANG
BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
PERTAMBANGAN PANAS BUMI, DAN PERTAMBANGAN UMUM
(PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
UNTUK TAHUN 2013

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM (PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
UNTUK TAHUN 2013

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	Iuran Tetap (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Nanggroe Aceh Darusallam		2.666.000.000	15.693.469.500	18.359.469.500
1	Kab. Aceh Tengah	IUP	-	4.389.862.400	4.389.862.400
2	Kab. Nagan Raya	IUP	-	2.607.832.600	2.607.832.600
3	Kab. Pidie	IUP, KK	66.000.000	2.026.681.700	2.092.681.700
4	Kab. Aceh Barat	IUP, KK	450.000.000	1.627.105.800	2.077.105.800
5	Kab. Gayo Lues	IUP	-	1.997.714.800	1.997.714.800
6	Kab. Aceh Besar	IUP	1.100.000.000	39.527.000	1.139.527.000
7	Kab. Aceh Selatan	IUP	-	1.138.763.400	1.138.763.400
8	Kab. Aceh Barat Daya	IUP	1.050.000.000	38.080.000	1.088.080.000
9	Kab. Aceh Tenggara	IUP	-	741.988.800	741.988.800
10	Kota Subulussalam	IUP	-	309.281.900	309.281.900
11	Kab. Aceh Jaya	IUP	-	274.556.800	274.556.800
12	Kab. Bireun	IUP	-	190.400.400	190.400.400
13	Kab. Aceh Timur	IUP	-	111.955.200	111.955.200
14	Kab. Aceh Utara	IUP	-	87.584.000	87.584.000
15	Kab. Aceh Tamiang	IUP	-	60.604.300	60.604.300
16	Kab. Pidie Jaya	IUP	-	50.684.400	50.684.400
17	Kab. Aceh Singkil	KK	-	846.000	846.000
II	Sumatera Utara		21.089.076.000	7.700.396.000	28.789.472.000
1	Kab. Tapanuli Selatan	KK	21.089.076.000	496.300.000	21.585.376.000
2	Kab. Mandailing Natal	IUP, KK	-	2.980.141.800	2.980.141.800
3	Kab. Tapanuli Utara	IUP, KK	-	2.576.065.300	2.576.065.300
4	Kota Padang Sidempuan	KK	-	495.225.000	495.225.000
5	Kab. Dairi	IUP, KK	-	452.502.000	452.502.000
6	Kab. Toba Samosir	IUP	-	303.497.700	303.497.700
7	Kab. Tapanuli Tengah	KK	-	236.610.000	236.610.000
8	Kab. Karo	IUP	-	155.671.200	155.671.200
9	Kab. Pakpak Bharat	KK	-	4.383.000	4.383.000
III	Sumatera Barat		42.167.600.000	5.806.146.500	47.973.746.500
1	Kota Sawahlunto	IUP	27.650.000.000	216.899.900	27.866.899.900
2	Kab. Dharmasraya	IUP	7.408.000.000	456.327.800	7.864.327.800
3	Kab. Solok Selatan	IUP	2.960.000.000	1.180.097.300	4.140.097.300
4	Kab. Sijunjung	IUP	3.385.900.000	124.741.700	3.510.641.700
5	Kab. Pasaman	IUP	-	1.933.460.900	1.933.460.900
6	Kab. Solok	IUP	217.000.000	824.451.000	1.041.451.000
7	Kab. Pesisir Selatan	IUP	420.000.000	412.725.300	832.725.300
8	Kab. Pasaman Barat	IUP	-	456.285.900	456.285.900
9	Kab. Lima Puluh Kota	IUP	126.700.000	136.261.600	262.961.600
10	Kab. Tanah Datar	IUP	-	38.783.600	38.783.600
11	Kab. Agam	IUP	-	21.439.000	21.439.000
12	Kota Padang	IUP	-	4.672.500	4.672.500
IV	Riau		32.694.000.000	8.094.179.000	40.788.179.000
1	Kab. Indragiri Hulu	IUP, PKP2B	20.140.000.000	4.375.712.400	24.515.712.400
2	Kab. Kuantan Singingi	IUP, PKP2B	8.592.000.000	1.379.077.900	9.971.077.900
3	Kab. Indragiri Hilir	IUP, PKP2B	3.962.000.000	331.495.000	4.293.495.000
4	Kab. Kampar	IUP	-	1.305.001.600	1.305.001.600
5	Kab. Meranti	IUP	-	484.434.700	484.434.700
6	Kab. Rokan Hulu	IUP	-	210.582.400	210.582.400
7	Kab. Pelalawan	PKP2B	-	7.875.000	7.875.000
V	Kepulauan Riau		87.246.200.000	8.260.824.500	95.507.024.500
1	Provinsi Kepulauan Riau	IUP	13.159.000.000	5.468.045.600	18.627.045.600
2	Kab. Bintan	IUP	31.200.000.000	140.553.600	31.340.553.600
3	Kab. Karimun	IUP, KK	21.130.000.000	1.267.293.700	22.397.293.700
4	Kota Tanjung Pinang	IUP	13.361.000.000	110.670.700	13.471.670.700
5	Kab. Lingga	IUP	8.396.200.000	1.274.260.900	9.670.460.900

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	Iuran Tetap (Rp)	Jumlah (Rp)
VI	Jambi		84.657.991.000	19.026.971.000	103.684.962.000
1	Kab. Bungo	IUP, PKP2B	49.046.726.000	955.104.300	50.001.830.300
2	Kab. Batang Hari	IUP, PKP2B	14.596.290.000	4.248.718.500	18.845.008.500
3	Kab. Sarolangun	IUP, PKP2B	11.182.370.000	4.710.398.600	15.892.768.600
4	Kab. Merangin	IUP	7.675.000.000	1.077.492.600	8.752.492.600
5	Kab. Tebo	IUP	950.000.000	2.696.517.100	3.646.517.100
6	Kab. Muaro Jambi	IUP	592.895.000	2.829.896.300	3.422.791.300
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	IUP	614.710.000	2.508.843.600	3.123.553.600
VII	Sumatera Selatan		980.072.534.000	61.490.458.500	1.041.562.992.500
1	Kab. Muara Enim	IUP, PKP2B	440.495.121.000	12.375.007.900	452.870.128.900
2	Kab. Lahat	IUP, PKP2B	322.648.695.000	2.779.779.600	325.428.474.600
3	Kab. Musi Banyuasin	IUP, PKP2B	154.758.716.000	11.199.398.200	165.958.114.200
4	Kab. Banyuasin	IUP, PKP2B	41.628.000.000	5.330.976.700	46.958.976.700
5	Kab. Ogan Komering Ulu	IUP, PKP2B	17.691.387.000	3.466.333.200	21.157.720.200
6	Kab. Musi Rawas	IUP, KK, PKP2B	1.435.000.000	7.742.176.700	9.177.176.700
7	Kab. Ogan Komering Ilir	IUP	-	9.122.480.900	9.122.480.900
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	IUP, PKP2B	200.615.000	3.305.364.000	3.505.979.000
9	Kab. Empat Lawang	IUP	-	2.270.101.500	2.270.101.500
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	IUP	-	1.861.064.800	1.861.064.800
11	Kota Prabumulih	IUP, PKP2B	1.215.000.000	473.639.000	1.688.639.000
12	Kab. Ogan Ilir	IUP	-	1.564.136.000	1.564.136.000
VIII	Kep. Bangka Belitung		451.670.599.000	28.422.315.500	480.092.914.500
1	Provinsi Kep. Bangka Belitung	IUP	-	11.712.631.200	11.712.631.200
2	Kab. Bangka	IUP	188.150.000.000	3.898.549.700	192.048.549.700
3	Kab. Bangka Tengah	IUP, KK	108.009.960.000	1.648.318.700	109.658.278.700
4	Kab. Bangka Barat	IUP	75.042.501.000	4.450.467.500	79.492.968.500
5	Kab. Bangka Selatan	IUP	33.547.861.000	2.683.778.400	36.231.639.400
6	Kab. Belitung Timur	IUP	28.643.480.000	2.810.172.600	31.453.652.600
7	Kab. Belitung	IUP	18.276.797.000	1.209.302.400	19.486.099.400
8	Kota Pangkal Pinang	IUP	-	9.095.000	9.095.000
IX	Bengkulu		153.362.082.000	11.348.800.500	164.710.882.500
1	Kab. Bengkulu Tengah	IUP	86.860.568.000	1.478.496.800	88.339.064.800
2	Kab. Bengkulu Utara	IUP	66.016.790.000	4.465.554.300	70.482.344.300
3	Kab. Kaur	IUP	484.724.000	1.817.450.200	2.302.174.200
4	Kab. Seluma	IUP	-	1.816.716.400	1.816.716.400
5	Kab. Mukomuko	IUP	-	986.786.000	986.786.000
6	Kab. Lebong	IUP	-	439.744.000	439.744.000
7	Kab. Bengkulu Selatan	IUP	-	344.052.800	344.052.800
X	Lampung		24.323.000.000	4.284.724.500	28.607.724.500
1	Kab. Tanggamus	IUP, KK	24.323.000.000	484.424.800	24.807.424.800
2	Kab. Mesuji	IUP	-	1.931.265.300	1.931.265.300
3	Kab. Tulang Bawang	IUP	-	1.103.196.800	1.103.196.800
4	Kab. Pesawaran	IUP	-	271.886.300	271.886.300
5	Kab. Way Kanan	IUP, PKP2B	-	143.265.000	143.265.000
6	Kab. Lampung Utara	IUP	-	130.658.200	130.658.200
7	Kab. Lampung Tengah	IUP	-	83.585.600	83.585.600
8	Kab. Lampung Selatan	IUP	-	49.199.400	49.199.400
9	Kab. Lampung Barat	IUP, KK	-	44.966.700	44.966.700
10	Kab. Pringsewu	IUP	-	42.276.400	42.276.400
XI	Jawa Barat		42.211.361.000	3.204.980.500	45.416.341.500
1	Kab. Bogor	IUP	38.742.265.000	342.370.500	39.084.635.500
2	Kab. Tasikmalaya	IUP	3.321.952.000	137.631.000	3.459.583.000
3	Kab. Cianjur	IUP	25.644.000	864.495.900	890.139.900
4	Kab. Garut	IUP	-	869.080.800	869.080.800
5	Kab. Sukabumi	IUP	121.500.000	577.547.900	699.047.900
6	Kab. Ciamis	IUP	-	408.712.900	408.712.900
7	Kab. Purwakarta	IUP	-	5.141.500	5.141.500
XII	Banten		18.379.147.000	1.168.239.500	19.547.386.500
1	Kab. Pandeglang	IUP	17.338.947.000	174.558.800	17.513.505.800
2	Kab. Lebak	IUP	1.040.200.000	993.680.700	2.033.880.700
XIII	Jawa Tengah		8.013.032.000	846.330.700	8.859.362.700
1	Kab. Cilacap	IUP	7.452.000.000	38.268.500	7.490.268.500
2	Kab. Jepara	IUP	521.000.000	11.957.100	532.957.100
3	Kab. Banyumas	IUP	-	402.353.300	402.353.300
4	Kab. Wonogiri	IUP	40.032.000	355.103.600	395.135.600
5	Kab. Kebumen	IUP	-	38.648.200	38.648.200
XIV	Daerah Istimewa Yogyakarta		4.505.625.000	156.956.000	4.662.581.000
1	Kab. Kulonprogo	IUP, KK	4.505.625.000	156.956.000	4.662.581.000
XV	Jawa Timur		529.000.000	1.345.604.500	1.874.604.500
1	Kab. Trenggalek	IUP	80.376.000	592.807.200	673.183.200
2	Kab. Lumajang	IUP	75.000.000	293.200.700	368.200.700
3	Kab. Banyuwangi	IUP	27.370.000	316.647.900	344.017.900
4	Kab. Pacitan	IUP	97.593.000	80.482.000	178.075.000
5	Kab. Blitar	IUP	166.758.000	3.255.000	170.013.000
6	Kab. Jember	IUP	55.063.000	58.604.300	113.667.300
7	Kab. Tulung Agung	IUP	26.840.000	607.400	27.447.400

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	Iuran Tetap (Rp)	Jumlah (Rp)
XVI	Kalimantan Barat		108.342.323.000	77.821.034.000	186.163.357.000
1	Kab. Ketapang	IUP	84.013.777.000	25.454.326.800	109.468.103.800
2	Kab. Sanggau	IUP	24.259.880.000	11.998.893.000	36.258.773.000
3	Kab. Kapuas Hulu	IUP	-	10.935.707.700	10.935.707.700
4	Kab. Melawi	IUP	-	9.664.936.300	9.664.936.300
5	Kab. Landak	IUP	-	6.844.337.400	6.844.337.400
6	Kab. Sintang	IUP, KK, PKP2B	-	5.289.486.800	5.289.486.800
7	Kab. Kayong Utara	IUP	-	3.206.791.000	3.206.791.000
8	Kab. Kubu Raya	IUP	-	1.683.631.000	1.683.631.000
9	Kab. Pontianak	IUP	-	1.370.746.700	1.370.746.700
10	Kab. Bengkayang	IUP	68.666.000	874.754.700	943.420.700
11	Kab. Sambas	IUP	-	316.542.600	316.542.600
12	Kab. Sekadau	IUP	-	180.880.000	180.880.000
XVII	Kalimantan Tengah		696.232.833.000	68.947.106.000	765.179.939.000
1	Kab. Murung Raya	IUP, KK, PKP2B	295.705.782.000	12.328.581.700	308.034.363.700
2	Kab. Kapuas	IUP, KK, PKP2B	177.346.947.000	10.020.687.900	187.367.634.900
3	Kab. Barito Utara	IUP, PKP2B	91.989.015.000	16.384.474.200	108.373.489.200
4	Kab. Barito Timur	IUP, PKP2B	67.756.732.000	7.001.393.000	74.758.125.000
5	Kab. Barito Selatan	IUP, PKP2B	31.500.000.000	3.386.364.300	34.886.364.300
6	Kab. Katingan	IUP, KK	22.094.034.500	3.589.455.400	25.683.489.900
7	Kab. Lamandau	IUP	6.723.000.000	2.912.605.900	9.635.605.900
8	Kab. Gunung Mas	IUP, KK	190.012.000	8.881.131.700	9.071.143.700
9	Kab. Kotawaringin Timur	IUP	2.291.351.000	1.395.279.700	3.686.630.700
10	Kab. Seruyan	IUP, KK	607.486.500	1.121.655.300	1.729.141.800
11	Kab. Sukamara	IUP	-	1.115.724.900	1.115.724.900
12	Kota Palangka Raya	IUP	28.473.000	410.883.200	439.356.200
13	Kab. Kotawaringin Barat	IUP, KK	-	398.868.800	398.868.800
XVIII	Kalimantan Selatan		3.486.641.887.000	27.885.011.500	3.514.526.898.500
1	Kab. Tanah Bumbu	IUP, KK, PKP2B	639.068.630.000	6.918.142.200	645.986.772.200
2	Kab. Balangan	IUP, PKP2B	636.480.000.000	1.553.544.700	638.033.544.700
3	Kab. Tanah Laut	IUP, KK, PKP2B	587.145.040.000	3.237.239.100	590.382.279.100
4	Kab. Tabalong	IUP, PKP2B	533.520.000.000	2.443.487.900	535.963.487.900
5	Kab. Kotabaru	IUP, KK, PKP2B	503.808.750.000	10.591.483.900	514.400.233.900
6	Kab. Tapin	IUP, PKP2B	318.886.642.000	843.178.700	319.729.820.700
7	Kab. Banjar	IUP, KK, PKP2B	201.897.321.000	1.446.014.500	203.343.335.500
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	IUP, PKP2B	48.600.000.000	501.919.500	49.101.919.500
9	Kota Banjarbaru	KK, PKP2B	17.235.504.000	228.933.000	17.464.437.000
10	Kab. Hulu Sungai Tengah	PKP2B	-	121.068.000	121.068.000
XIX	Kalimantan Timur		7.939.061.934.000	130.608.976.500	8.069.670.910.500
1	Kab. Kutai Timur	IUP, PKP2B	3.248.830.809.000	26.676.868.000	3.275.507.677.000
2	Kab. Kutai Kartanegara	IUP, PKP2B	2.127.055.171.000	24.264.177.800	2.151.319.348.800
3	Kab. Berau	IUP, PKP2B	760.308.096.000	7.384.282.900	767.692.378.900
4	Kab. Paser	IUP, PKP2B	722.185.241.000	3.656.078.800	725.841.319.800
5	Kab. Kutai Barat	IUP, KK, PKP2B	497.151.952.000	34.005.625.300	531.157.577.300
6	Kota Samarinda	IUP, PKP2B	237.870.203.000	1.351.909.900	239.222.112.900
7	Kab. Nunukan	IUP, PKP2B	188.263.078.000	2.126.281.800	190.389.359.800
8	Kab. Malinau	IUP	88.487.190.000	11.276.497.100	99.763.687.100
9	Kab. Bulungan	IUP, PKP2B	57.086.215.000	13.568.253.200	70.654.468.200
10	Kab. Penajam Paser Utara	IUP	6.636.139.000	4.891.695.800	11.527.834.800
11	Kab. Tana Tidung	IUP	5.187.840.000	1.385.003.900	6.572.843.900
12	Kota Bontang	PKP2B	-	22.302.000	22.302.000
XX	Nusa Tenggara Barat		72.157.803.000	12.219.733.500	84.377.536.500
1	Kab. Sumbawa Barat	IUP, KK	72.157.803.000	2.683.779.700	74.841.582.700
2	Kab. Sumbawa	IUP, KK	-	5.362.627.200	5.362.627.200
3	Kab. Bima	IUP, KK	-	2.710.163.300	2.710.163.300
4	Kab. Dompu	IUP, KK	-	1.107.714.600	1.107.714.600
5	Kab. Lombok Barat	IUP	-	355.391.500	355.391.500
6	Kab. Lombok Timur	IUP	-	57.200	57.200
XXI	Nusa Tenggara Timur		2.315.258.000	12.807.913.000	15.123.171.000
1	Kab. Timor Tengah Utara	IUP	774.437.000	2.030.368.400	2.804.805.400
2	Kab. Belu	IUP	698.070.000	2.050.229.100	2.748.299.100
3	Kab. Timor Tengah Selatan	IUP	842.751.000	808.457.500	1.651.208.500
4	Kab. Nage Keo	IUP	-	1.313.996.000	1.313.996.000
5	Kab. Sumba Timur	IUP	-	941.946.800	941.946.800
6	Kab. Kupang	IUP	-	882.332.700	882.332.700
7	Kab. Sumba Barat Daya	IUP	-	882.313.600	882.313.600
8	Kab. Ende	IUP	-	812.680.500	812.680.500
9	Kab. Sumba Tengah	IUP	-	777.403.200	777.403.200
10	Kab. Sumba Barat	IUP	-	528.360.000	528.360.000
11	Kab. Ngada	IUP	-	429.014.900	429.014.900
12	Kab. Manggarai	IUP	-	385.266.700	385.266.700
13	Kab. Alor	IUP	-	346.623.400	346.623.400
14	Kab. Rote Ndao	IUP	-	294.175.700	294.175.700
15	Kab. Manggarai Timur	IUP	-	248.584.500	248.584.500
16	Kab. Sabu Raijua	IUP	-	76.160.000	76.160.000

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	Iuran Tetap (Rp)	Jumlah (Rp)
XXII	Sulawesi Utara		49.449.417.000	7.280.577.000	56.729.994.000
1	Kab. Minahasa Utara	IUP, KK	44.182.800.000	385.362.300	44.568.162.300
2	Kab. Bolaang Mongondow Timur	IUP, KK	3.003.437.000	2.292.161.000	5.295.598.000
3	Kota Bitung	KK	2.263.180.000	11.551.500	2.274.731.500
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	IUP, KK	-	1.587.851.100	1.587.851.100
5	Kab. Kepulauan Talaud	IUP	-	909.616.900	909.616.900
6	Kab. Minahasa Selatan	IUP, KK	-	887.891.700	887.891.700
7	Kab. Minahasa Tenggara	KK	-	533.215.200	533.215.200
8	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	IUP	-	306.924.800	306.924.800
9	Kab. Bolaang Mongondow	IUP, KK	-	270.393.000	270.393.000
10	Kab. Kepulauan Sangihe	IUP	-	95.200.000	95.200.000
11	Kota Manado	KK	-	409.500	409.500
XXIII	Gorontalo		-	5.020.450.700	5.020.450.700
1	Kab. Pohuwato	IUP, KK	-	1.618.326.800	1.618.326.800
2	Kab. Gorontalo	IUP, KK	-	1.491.812.800	1.491.812.800
3	Kab. Gorontalo Utara	IUP	-	1.028.807.400	1.028.807.400
4	Kab. Bone Bolango	IUP, KK	-	787.065.300	787.065.300
5	Kab. Boalemo	IUP	-	94.438.400	94.438.400
XXIV	Sulawesi Tengah		54.529.852.000	36.375.690.000	90.905.542.000
1	Kab. Morowali	IUP, KK	45.835.265.000	12.727.764.400	58.563.029.400
2	Kab. Banggai	IUP	7.726.382.000	4.294.034.200	12.020.416.200
3	Kab. Tojo Una-Una	IUP	968.205.000	6.148.248.300	7.116.453.300
4	Kab. Toli-Toli	IUP, KK	-	3.114.591.600	3.114.591.600
5	Kab. Donggala	IUP, KK	-	3.007.242.500	3.007.242.500
6	Kab. Poso	IUP	-	2.742.578.800	2.742.578.800
7	Kab. Parigi Moutong	IUP, KK	-	2.346.692.800	2.346.692.800
8	Kab. Buol	IUP, KK	-	1.421.760.900	1.421.760.900
9	Kota Palu	KK	-	343.224.600	343.224.600
10	Kab. Sigi	IUP, KK	-	229.551.900	229.551.900
XXV	Sulawesi Selatan		61.868.715.000	10.864.352.000	72.733.067.000
1	Kab. Luwu Timur	IUP, KK	60.904.037.000	2.306.120.700	63.210.157.700
2	Kab. Luwu Utara	IUP, KK	-	3.155.313.200	3.155.313.200
3	Kab. Kepulauan Selayar	IUP	-	1.510.728.800	1.510.728.800
4	Kab. Luwu	IUP, KK	-	1.328.880.500	1.328.880.500
5	Kab. Sinjai	IUP	-	911.587.600	911.587.600
6	Kab. Maros	IUP	523.478.000	176.319.900	699.797.900
7	Kab. Barru	IUP	240.000.000	223.834.300	463.834.300
8	Kab. Takalar	IUP	201.200.000	150.336.000	351.536.000
9	Kab. Bone	IUP	-	293.006.600	293.006.600
10	Kab. Enrekang	IUP, KK	-	262.476.800	262.476.800
11	Kota Palopo	IUP	-	247.520.000	247.520.000
12	Kab. Sidenreng Rappang	KK	-	119.745.000	119.745.000
13	Kab. Tana Toraja	IUP	-	108.528.000	108.528.000
14	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	IUP	-	39.184.400	39.184.400
15	Kab. Toraja Utara	IUP	-	18.583.200	18.583.200
16	Kab. Wajo	KK	-	8.379.000	8.379.000
17	Kab. Soppeng	IUP	-	3.808.000	3.808.000
XXVI	Sulawesi Barat		1.776.600.000	10.776.240.000	12.552.840.000
1	Kab. Mamuju	IUP	-	9.572.931.000	9.572.931.000
2	Kab. Polewali Mandar	IUP	1.776.600.000	242.664.800	2.019.264.800
3	Kab. Mamasa	IUP	-	501.646.900	501.646.900
4	Kab. Mamuju Utara	IUP	-	380.800.000	380.800.000
5	Kab. Majene	IUP	-	78.197.300	78.197.300
XXVII	Sulawesi Tenggara		239.009.771.000	21.853.006.500	260.862.777.500
1	Kab. Kolaka	IUP, KK	114.574.434.000	1.258.556.500	115.832.990.500
2	Kab. Bombana	IUP, KK	34.877.305.000	5.486.296.300	40.363.601.300
3	Kab. Konawe Utara	IUP	32.144.084.000	5.369.482.700	37.513.566.700
4	Kab. Kolaka Utara	IUP, KK	31.632.464.000	1.549.046.900	33.181.510.900
5	Kab. Konawe Selatan	IUP, KK	23.493.005.000	1.601.441.400	25.094.446.400
6	Kab. Konawe	IUP, KK	2.225.746.000	4.013.028.400	6.238.774.400
7	Kab. Buton	IUP	62.733.000	1.769.981.200	1.832.714.200
8	Kab. Buton Utara	IUP	-	476.422.800	476.422.800
9	Kab. Muna	IUP	-	191.504.300	191.504.300
10	Kota Bau-Bau	IUP	-	137.246.000	137.246.000
XXVIII	Maluku		62.300.000	10.236.081.500	10.298.381.500
1	Kab. Maluku Barat Daya	IUP	62.300.000	5.669.179.000	5.731.479.000
2	Kab. Seram Bagian Barat	IUP	-	2.363.816.000	2.363.816.000
3	Kab. Maluku Tenggara Barat	IUP	-	1.196.378.400	1.196.378.400
4	Kab. Buru Selatan	IUP	-	673.641.300	673.641.300
5	Kab. Maluku Tengah	IUP	-	333.066.800	333.066.800
XXIX	Maluku Utara		244.732.686.000	26.299.825.500	271.032.511.500
1	Kab. Halmahera Timur	IUP	155.431.774.000	4.062.605.800	159.494.379.800
2	Kab. Halmahera Selatan	IUP	54.800.521.000	5.970.912.400	60.771.433.400
3	Kab. Halmahera Utara	IUP, KK	24.426.992.000	3.010.959.300	27.437.951.300
4	Kab. Halmahera Tengah	IUP, KK	10.073.399.000	3.189.752.000	13.263.151.000
5	Kab. Kepulauan Sula	IUP	-	8.183.911.000	8.183.911.000
6	Kota Tidore Kepulauan	IUP	-	837.169.700	837.169.700
7	Kab. Halmahera Barat	IUP	-	829.953.600	829.953.600
8	Kab. Morotai	IUP	-	214.561.700	214.561.700

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Iuran Produksi (Royalti) (Rp)	Iuran Tetap (Rp)	Jumlah (Rp)
XXX	P a p u a		1.952.385.300.000	54.593.964.600	2.006.979.264.600
1	Kab. Mimika	IUP, KK	1.952.385.300.000	2.100.393.400	1.954.485.693.400
2	Kab. Yahukimo	IUP	-	11.881.761.600	11.881.761.600
3	Kab. Mamberamo Raya	IUP	-	8.833.189.100	8.833.189.100
4	Kab. Puncak Jaya	IUP, KK	-	5.706.678.700	5.706.678.700
5	Kab. Keerom	IUP, KK	-	5.222.721.400	5.222.721.400
6	Kab. Sarmi	IUP, KK	-	4.333.855.000	4.333.855.000
7	Kab. Pegunungan Bintang	KK	-	3.931.177.800	3.931.177.800
8	Kab. Nabire	IUP, KK	-	3.340.465.900	3.340.465.900
9	Kab. Paniai	IUP, KK	-	3.003.501.900	3.003.501.900
10	Kab. Waropen	IUP, KK	-	2.692.030.600	2.692.030.600
11	Kab. Jayapura	IUP	-	1.860.398.400	1.860.398.400
12	Kab. Boven Digoel	IUP	-	1.372.403.200	1.372.403.200
13	Kab. Tolikara	KK	-	257.517.000	257.517.000
14	Kab. Jayawijaya	IUP, KK	-	57.870.600	57.870.600
XXXI	Papua Barat		7.215.299.000	39.203.011.000	46.418.310.000
1	Kab. Teluk Bintuni	IUP	-	10.468.153.100	10.468.153.100
2	Kab. Raja Ampat	IUP, KK	7.215.299.000	2.641.626.000	9.856.925.000
3	Kab. Manokwari	IUP	-	9.060.355.000	9.060.355.000
4	Kab. Teluk Wondama	IUP	-	5.708.725.100	5.708.725.100
5	Kab. Fakfak	IUP	-	5.519.696.000	5.519.696.000
6	Kab. Sorong	IUP	-	2.119.437.200	2.119.437.200
7	Kab. Tambrau	IUP	-	2.057.523.200	2.057.523.200
8	Kab. Sorong Selatan	IUP	-	1.141.657.400	1.141.657.400
9	Kab. Kaimana	KK	-	485.838.000	485.838.000
	J u m l a h		16.869.369.225.000	729.643.370.000	17.599.012.595.000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto